

Daftar Pustaka

A. Buku Literatur :

- Ali Achmad. 2004. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta. Kencana Prenadamedia Group
- Ali, Mahrus. 2012. *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia cetakan kedua*. Jakarta. Sinar Grafika
- Apeldoorn, L. J. Van. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta. Pradya Paramita
- Artantotojati, Sigit. 2012. *Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama*. Jakarta. Bina Aksara
- Atmasasmita, Romli. 2004. *Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional dan Aspek Internasional*. Bandung. Mandar maju.
- _____. 2007. *Analisis dan Evaluasi Hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional
- Batubara, E. Nurhaini. 2010. *Sistem Peradilan dalam Negara Hukum Republik Indonesia*. Jakarta. Legalitas.
- Chazawi, Adami. 2008. *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. Bandung. Alumni.
- Djaja, Ermansyah. 2010. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*. Jakarta. Sinar Grafika
- Effendy, Marwan. 2013. *Korupsi & Strategi Nasional Pencegahan Serta Pemberantasannya*. Jakarta. Referensi
- Faisal. 2012. *Menerobos Positivisme Hukum*. Bekasi. Gramata Publishing
- Hamdan. 2012. *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung. Refika Aditama
- Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafis.
- _____. 2007. *Tindak Pidana Korupsi*, edisi kedua. Jakarta. Sinar Grafika.

Hamzah, Andi. 2001. *pengantar hukum acara pidana indonesia edisi revisi*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

_____. 2008. *Hukum acara Pidana Indonesia Edisi kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.

Harahap, M. Yahya. 2003. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali) edisi kedua*. Jakarta. Sinar Grafika.

_____. 2000. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Jilid I)*. Jakarta. Pustaka Kartini.

Hiriej, Eddy O.S. 2012. *Teori dan Hukum Pembuktian*. Jakarta. Erlangga.

H. Salim dan Erlies Septian Numani. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta. PT Raja Grafindo

Ilias, Chatzi (et.al).2010. *Praktik Terbaik Perlindungan Saksi dalam Proses Pidana yang Melibatkan Kejahatan Terorganisir* .Jakarta. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Kaligis, O.C, 2006, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, terdakwa dan Terpidana, cet, Pertama*, Bandung, P.T Alumni

Lamintang Theo dan P.A.F Lamintang. 2010. *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, Jakarta. Sinar Grafika.

Makaraao, Muhammad Taufik. 2010. *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*. Jakarta. Ghalia Indonesia.

Marzuki, Peter M. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana Prenanda Media Group.

Mertokusumo, Sudikno. 2003. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta. Liberty.

_____.1988. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta. Liberty.

Nawawi Arif, Barda, 2007, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta, Kencana Prenada Media.

- Nugroho, Hibnu .2012. *Integralisasi Penyidikan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia*. Jakarta. Media Prima Aksa.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 2001. *Penerapan Pembuktian terbalik Dalam delik Korupsi (UU NO.30 Tahun 1999)*. Bandung. Bandar maju
- Rohmini, Mien. 2003. *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Bandung. Alumni.
- Rosita Lily dan Hari Sasangka. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung. Mandar Maju
- Simanjutak, Nikolas. 2009. *Acara Pidana di Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Bogor: Ghlmia Indonesia
- Sudarsono. 2009. *Kamus Hukum*. Bandung. Rineka Cipta
- Surachmin dan Suhandi Cahaya. 2011. *Strategi dan Teknik Korupsi*. Jakarta. Sinar Grafika.
- Sulistiani, Lies. *et.Al, Sudut Pandang Peran LPSK dalam Perlindungan Saksi dan Korban*, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
- Syamsudin, M. 2012. *Konstruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta. Kencana
- Tirtaamidjaja, MH. 2005. *Pokok-Pokok Hukum Pidana: Edisi Revisi*. Jakarta. Fasco
- United Nations Office on Drugs and Crime, *The good Practices for the Protection of Witnesses in Criminal Proceedings Involving Organized Crime*, New York, United Nations, 2008
- Wijaya, Firman. 2012. *Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Perspektif Hukum*. Jakarta. Penaku.
- Winarta, Frans H. 2003. *Pencapaian Supremasi Hukum yang Beretika dan Bermoral*, Vol. 20No. 1. Jakarta. Pro Justitia.
- Witanto Darmoko Yuti. 2013. *Diskresi Hakim: Sebuah Instrumen Menegakkan Keadilan Substantif dalam Perkara-perkara Pidana*. Bandung. ALFABETA

B. Jurnal

Nixon, Syarifuddin Kalo, Tan Kamello, dan Mahmud Mulyadi, *Perlindungan Hukum terhadap Whistle Blower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Sumatra Utara Law Journal Vol. II-No.2 (Nov 2013), Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara

Supriadi Widodo Eddyono, *Prospek perlindungan Justice Collaborator di Indonesia, perbandingannya dengan di Amerika dan Eropa*, jurnal perlindungan vol 1 no. 1, 2011

Setyono, *Eksistensi Saksi Mahkota sebagai alat bukti dalam Perkara Pidana*, Lex Jurnalica Vol.5 No.1, Desember 2007

C. Makalah

Djoko Sarwoko, 2011, "*Reward bagi "Whistle Blower" (Pelapor Tindak Pidana) Dan "Justice Collaborator" (Saksi Pelaku yang Bekerja Sama) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu*", Makalah Tuada Pidsus dalam Rakernas Mahkamah Agung dengan Pengadilan Seluruh Indonesia

Semendawai, Abdul Haris, *Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Pengaturan Justice Collaborator dalam Pelaksanaan Perlindungan Saksi di Indonesia*, (Makalah disampaikan pada Internasional Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator, diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) bekerjasama dengan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Jakarta, 19-20 Juli 2011

Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum, *Perlindungan terhadap Pelaku yang Bekerjasama*, (Makalah disampaikan pada International Workshop on The Protection of Whistleblower as Justice Collaborator yang diselenggarakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bekerjasama dengan Satgas Mafia Hukum, Jakarta, 19-20 Juli 2011.

Zimmerman Anne Katharina, *Securing Protection and Cooperation of Witnesses and Whistle Blower: An Overview of the Law as it stands in Germany*, (makalah disampaikan pada UNAFEI Fourth Regional Seminar on Good Governance for Southeast Asian Countries, Tokyo November, 2011)

D. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

_____, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

_____, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

_____, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

_____, Perjanjian kerjasama antara Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Peningkatan Kapasitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana dari Aspek Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.H 09.HM.05.02 Tahun 2015 dan Nomor: NK-005/1.DIY4.2ILPSKI04I2015.

_____, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Peraturan Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat*, PERMEN No. M.HH-02.PK.05.06 TAHUN 2010

E. Internet

Wikipedia, *Korupsi*, diakses dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi>, pada tanggal 30 September 2017 pukul 22.30

Tempo.co, *Ini Daftar Peringkat Korupsi Dunia, Indonesia Urutan Berapa*, diakses dari <https://m.tempo.co/read/news/2016/01/27/063739957/ini-daftar-peringkat-korupsi-dunia-indonesia-urutan-berapa>, pada tanggal 30 September 2017 pukul 23.20

Hukumonline.com, *Perbedaan Whistle Blower dan Justice Collaborator*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4fb7bff86349a/perbedaan-iwhistle-blower-i-dan-ijustice-collaborator-i>, pada tanggal 1 Oktober 2017 pukul 00.25

Hukumonline.com, *Memahami Lagi Aspek Pengaturan dan Implementasi Justice Collaborator*, diakses dari <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5a70404cac0bd/memahami-lagi-aspek-pengaturan-dan-implementasi-justice-collaborator>, pada tanggal 27 Maret 2018 pukul 6.30